

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah memiliki badan/lembaga/ institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Di Indonesia *Good Corporate Governance* sudah diterapkan pada jenis-jenis perusahaan (termaksud jenis perusahaan lembaga keuangan perbankan). Bank adalah institute keuangan yang paling terkait dengan regulasi (Mukuddem-Peterse, 2008), anggapan di masyarakat bahwa bank merupakan industri yang paling banyak diatur, dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini karena apabila bank mengalami kesulitan maka pemilik (pemegang saham) merupakan pihak yang paling kecil mengalami kerugian. Terdapat pihak lain yang dalam jumlah banyak tetapi dalam nominal kecil yang sangat rentan terhadap risiko.

Regulasi perbankan terkait dengan institusi perbankan serta produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank, tujuan regulasi pada industri perbankan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut. Regulasi yang dilakukan terhadap bank berbeda dengan regulasi terhadap industri lain, jika pada industri lain regulasi pada umumnya menyangkut terstandarisasi produk dan persaingan usaha, regulasi pada industri perbankan mencakup keseluruhan bank secara komprehensif (Idrose, 2008). Bank Indonesia mengeluarkan peraturan BI No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi perbankan dengan salah satu butir yang ada di dalam peraturan tersebut mensyaratkan adanya praktek manajemen risiko yang spesifik. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *cadbury*

Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager dkk, 2003).

Ketua dewan komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bapak Santosa mengatakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) di Indonesia relative tertinggal dibanding Negara-negara tetangga. Indonesia hanya menempatkan dua emiten sebagai ASEANs Top 50 Issuers with the best GCG dalam ASEAN Capital Market Forum (ACMF) di Manila, Filipina”. Dua emiten Indonesia dalam *ASEAN Corporate Governance Awards 2015* tersebut adalah PT Bank Danamon Tbk (BDMN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB). Pencapaian Negara lain lebih baik dari Indonesia, seperti Thailand yang mampu menepatkan 23 emiten. Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten dan Malaysia 6 emiten. (Antaraneews, 2017)

Kurang optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* disebabkan adanya hambatan-hambatan. Hambatan utama dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yaitu tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya dan faktor budaya masyarakat yang lebih mematuhi hukum informal yang berupa kebiasaan dari pada hukum formal. Rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Negara dan perangkatnya sebagai regulator harus memaksa perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan budaya perusahaan sebagai sebuah kesatuan nilai harmonis yang diiringin dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegak hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*), dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan tata kelolah perusahaan yang baik sebagai pedomon dasar pelaksanaan usaha, dan masyarakat melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab (Mundzir, 2016).

Sehubung dengan hal tersebut maka inisiatif dalam pengembangan implementasi GCG harus dilakukan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Negara Indonesia akan semakin tertinggal di belakang Negara-negara lain. Implementasi GCG diharapkan

dapat mendukung terciptanya iklim usaha dan perekonomian nasional yang lebih stabil dan kompetitif, serta memiliki daya tahan yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin cepat.

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) hingga saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah agar dapat dikembangkan oleh dunia usaha. Konsep ini dianggap sangat penting untuk diterapkan agar perusahaan di Indonesia dapat kuat dalam menghadapi krisis. Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh dunia usaha saat ini dalam hal pengembangan tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara. Untuk itu, masih terdapat pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah agar terbentuk kultur tata kelola yang baik pada setiap perusahaan (Okezone, 2017).

Salah satu pekerjaan rumah yang tersisa adalah bangun kultur, dalam perusahaan ada pedoman tapi baru dalam sebatas ceklis. Tantangan ini akan jadi tantangan yang tidak pernah selesai ini betul-betul terkait perubahan perilaku, perubahan paradigma. Ada yang menanggapi pekerjaan GCG merepotkan atau buang-buang waktu untuk itu perlu secara dramatis tingkatkan paradigma ini untuk tingkatkan value perusahaan, sehingga ini juga jadi kepentingan tidak hanya regulator. Pemerintah dan pihak swasta lainnya juga diharapkan dapat beradaptasi tentang perkembangan tata kelola perusahaan di negara lainnya, hal ini dibutuhkan agar perusahaan di Indonesia tidak kalah saing terutama dalam menggaet investor (Okezone, April 17, 2017). Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia khususnya prinsip responsibilitas, dimana dinyatakan bahwa “Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*” (Solihin, 2009).

Banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black dkk., 2009; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati dkk., 2004). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan (*usefulness*) dari peneringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *corporate governance* atau bisa kita sebut sebagai determinan dari implementasi *corporate governance* dapat bervariasi dikarenakan adanya variasi manfaat pengendalian yang diberikan dan biaya yang ditimbulkan bagi manajer dan pemegang saham perusahaan. Oleh karena masalah keagenan bervariasi antar perusahaan, maka biaya dan manfaat bersih dari berbagai alternatif struktur *corporate governance* yang digunakan untuk mengendalikan masalah-masalah keagenan tersebut juga bervariasi. Variasi biaya dan manfaat dari implementasi *corporate governance* sangat ditentukan pada situasi lingkungan perusahaan, industri maupun regulasi (Gillan dkk., 2009).

Beberapa peneliti sudah berhasil menemukan determinan dari implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan diantaranya Gillan dkk. (2009) telah menemukan bahwa variasi struktur *governance* dipengaruhi oleh faktor-faktor industri dan perusahaan. Drobotz dkk. (2004) menemukan bahwa determinan dari peringkat *corporate governance* adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi dan jenis standard akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Analisis yang dilakukan oleh Barucci dan Falini (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali yang besar, kepemilikan finansial (*financial holdings*), perusahaan yang dimiliki oleh kelompok piramid (koalisi pemegang saham) memiliki kualitas *corporate governance* yang rendah. Sedangkan penelitian dari Darmawati (2006) telah menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan BUMN dan non BUMN mempengaruhi perusahaan

dalam menerapkan *good corporate governance*. Rachmawati (2009) telah menemukan hasil penelitian dengan melakukan analisis yang terkait dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan dan jenis perusahaan BUMN maupun non BUMN, diharapkan bisa lebih hati-hati dalam membuat keputusan investasi maupun kredit. Sedangkan Kusuma (2017) menunjukan hasil bahwa Variable regulasi berpengaruh secara langsung terhadap manajemen risiko, adanya aturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 yang mengatur mengenai keharusan penerapan aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia. Sedangkan adanya pengaruh faktor-faktor regulasi, industri dan perusahaan terhadap praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan telah dibuktikan oleh Black dan Kim (2009). Durnev dan Kim (2009) telah membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan investasi (*investment opportunities*) yang tinggi, kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi, dan lebih struktur kepemilikan terkonsentrasinya hak-hak terhadap aliran kas perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* yang berkualitas tinggi.

Berkaitan dengan berbagai temuan empiris di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari implementasi *corporate governance* di perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Durnev dan Kim (2009) juga menunjukkan bahwa dari 27 negara-negara di Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang berkaitan dengan proteksi investor yang paling rendah. Dengan masih lemahnya sistem hukum dan regulasi di Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan beberapa perusahaan memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih tinggi dibandingkan yang disyaratkan oleh hukum atau dengan kata lain, adakah pola sistematis yang menggambarkan pemilihan perusahaan akan kualitas *corporate governance*. Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Darmawati (2006). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada objek dan tahun penelitian. Objek penelitian sebelumnya terletak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun (2006).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance* (Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI).**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut adalah Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance* (Perusahaan Perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
2. Apakah konsentrasi kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
3. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
5. Apakah faktor regulasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Memberikan tambahan pemahaman kepada penulis dalam bidang keuangan khususnya tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis dan berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi mengenai kualitas implementasi *corporate governance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung tentang penelitian yang akan dilakukan penulis, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis dan alat analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang analisis data, pengujian regresi klasik, dan pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dan pembahasan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dianalisis dan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**